



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

KESIMPULAN

**RAPAT DENGAR PENDAPAT
BADAN AKUNTABILITAS PUBLIK DPD RI
DALAM RANGKA
TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT ADAT MODANG LONG WAI DESA
LONG BENTUQ, KECAMATAN BUSANG, KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TERKAIT KONFLIK LAHAN DAN HUTAN DENGAN PT. SUBUR
ABADI WANA AGUNG DAN HGU PT. HAMPARAN PERKASA MANDIRI**

I. Keterangan

1. Hari/Tanggal : Jumat, 5 November 2021
2. Pukul : 09.00 WITA s.d. selesai
3. Tempat : Ruang Rapat Tepian I Lt.2 Kantor Gubernur Kalimantan Timur
4. Pimpinan Rapat : Ir. H. Bambang Sutrisno, M.M. (Ketua)
5. Sekretaris Rapat : Riza Sari
6. Agenda : Rapat Dengar Pendapat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Adat Modang Long Wai Desa Long Bentuq, Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Terkait Konflik Lahan Dan Hutan Dengan PT. Subur Abadi Wana Agung (SAWA) dan HGU PT. Hamparan Perkasa Mandiri (HPM)
7. Peserta Rapat :
 - Pimpinan dan Anggota BAP DPD RI;
 - Wakil Gubernur Kalimantan Timur;
 - Wakil Bupati Kutai Timur;
 - Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Kalimantan;
 - Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur;
 - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur;
 - Perwakilan Masyarakat Adat Modang Long Wai Desa Long Bentuq;
 - Perwakilan PT. SAWA dan PT HPM.

II. Kesimpulan Rapat :

1. Mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk terus melakukan fasilitasi dan mediasi melalui jalur non litigasi dan memperkuat pengawasan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Kutai Timur.
2. Mendorong Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk mengaktifkan peran forum pelaksana *Community Development* dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Subur Abadi Wana Agung dan PT Hamparan Perkasa Mandiri sehingga program-program *Community Development* dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dapat terlaksana secara terpadu, efisien, dan berkelanjutan agar tuntutan Masyarakat Adat Modang Long Wai Long Bentuq dapat diakomodir sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Mendorong Masyarakat Adat Modang Long Wai Long Bentuq mengajukan permohonan untuk pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan diminta kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur segera melakukan percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. BAP DPD RI akan melaksanakan pemantauan terkait permasalahan tuntutan masyarakat adat Long Wai Long Bentuq.

Samarinda, 5 November 2021
Badan Akuntabilitas Publik DPD RI
Ketua,

Wakil Gubernur
Kalimantan Timur,

H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si.

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Kutai Timur

Dr. Murad Abdullah, S.Sit., M.H
Kepala Balai PSKL Wil. Kalimantan
KLHK RI

Ir. Nurhasnih, MIM

Ir. H. Bambang Sutrisno, M.M.
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Pemkab Kutai Timur,

Dr. H. Suko Buono, M.Si.

Direktur PT. SAWA dan PT. HPM

Adil Burus

General Manager Program CSR PT.
SAWA dan PT. HPM

Angga Rachmat Perdana

Kepala Kanwil BPN
Provinsi Kalimantan Timur,

Asnedi, A.Pthnh, M.H.

Kepala Masyarakat Adat Modang
Long Wai Long Bentuq

Daud Luwing